

**BENTUK-BENTUK PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA  
SEBAGAI FAKTOR PENYEBAB PEREMPUAN DAN ANAK  
MENJADI WARGA BINAAN PANTI SOSIAL KARYA WANITA  
ANDAM DEWI KABUPATEN SOLOK**

*EXECUTIVE SUMARY*



**OLEH:  
NADILA NAZA FITRI  
NPM: 2010012111099**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG  
HATTA PADANG**

**2025**

# **BENTUK-BENTUK PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI FAKTOR PENYEBAB PEREMPUAN DAN ANAK MENJADI WARGA BINAAN PANTI SOSIAL KARYA WANITA ANDAM DEWI KABUPATEN SOLOK**

Nadila Naza Fitri<sup>1</sup>, Nurbeti<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta<sup>1</sup>

Email: [nadilanzafitri2612@gmail.com](mailto:nadilanzafitri2612@gmail.com)

---

## **ABSTRACT**

*The formation of The Andam Dewi Women's Social Home PSKW is to reduce and provide guidance, Problem formulation: 1) What are the forms of human rights violations that occur to women and children as a cause of becoming foster children at the Andam Dewi PSKW, Solok Regency? 2) What are the government's obstacles to overcoming human rights violations as a form of women and children becoming residents of the Andam Dewi PSKW, Dewi Suka Rami, Solok Regency? 3). What are the efforts made by the government to overcome human rights violations as a form of women and children becoming residents of the PSKW Andan Delwil Suka Rami Solok Regency? 1) Forms of human rights violations that occur to women and children as the cause of becoming inmates at the Andam Dewi PSKW Solok Regency in the form of legal and social discrimination. 2) Obstacles faced by the government to overcome human rights violations as the cause of women and children becoming inmates at the Andam Dewi Suka Rami PSKW Solok Regency in the form of economic, family, social and cultural factors. 3) Efforts to overcome the obstacles faced by the Government regarding human rights violations as the cause of becoming inmates at the Andam Dewi Suka Rami PSKW Solok*

***Keywords: Violations, Human Rights, PSKW Andam Dewi, Solok Regency***

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu dan anak, keluarga memiliki peran yang sangat besar terhadap pembentukan perilaku seseorang agar terhindar dari penyimpangan sosial. Hubungan sosial diantara keluarga diyakini oleh rasa kasih sayang dan rasa tanggung jawab, hubungan sosial antara keluarga relatif tetap untuk melindungi anak dalam rangka sosialisasi agar mampu menjalankan fungsi sosialnya.<sup>1</sup>

Kejahatan terhadap mental perempuan atau anak termasuk dalam pelanggaran HAM ringan yang berarti pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang, tetapi tetap merugikan orang tersebut, karena berupa tindakan penganiayaan serta aksi kekerasan dan juga gangguan pada pola pikir anak dan Perempuan.<sup>2</sup> Pada awalnya anak bisa melakukan penyimpangan sosial karena orang tua yang lalai dalam menjalankan perannya.

Permasalahan Prostitusi yang menyangkut harkat dan martabat manusia yang termasuk dalam kategori perdagangan manusia. Salah satu bentuk penyimpangan norma (penyakit masyarakat) yang dianggap sebagai masalah sosial, yang mempunyai sejarah yang panjang sejak adanya kehidupan manusia telah di atur norma-norma perkawinan dan tidak ada habis-habisnya yang terdapat disemua negara.

Terlepas dari berbagai penyebab dan dampak yang ditimbulkannya, masalah PSKW memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah tersebut yaitu melakukan upaya rehabilitasi terhadap para PSKW melalui lembaga- lembaga sosial yang ada. Dinas Sosial telah mendirikan Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi. Keberadaan PSKW Andam Dewi seharusnya berpengaruh besar dalam upaya pemerintah dalam mengurangi jumlah Prostitusi yang semakin meningkat jumlahnya.<sup>3</sup>

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja bentuk pelanggaran HAM yang terjadi pada perempuan dan anak sebagai penyebab menjadi warga binaan di PSKW Andam Dewi Kabupaten Solok?
2. Apa saja kendala-kendala pemerintah untuk mengatasi pelanggaran HAM sebagai penyebab perempuan dan anak menjadi warga binaan PSKW Andam Dewi Suka Rami Kabupaten Solok?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kendala-kendala pemerintah dalam mengatasi

pelanggaran HAM sebagai penyebab perempuan dan anak menjadi warga binaan PSKW Andam Dewi Suka Rami Kabupaten Solok?

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

1. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.
2. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.
3. Teknik pengumpulan data dengan melakukan studi dokumen wawancara, dan analisis data.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Bentuk Pelanggaran HAM yang Terjadi pada Perempuan dan Anak sebagai Penyebab menjadi Warga Binaan di PSKW Andam Dewi**

Perempuan dan anak yang menjadi warga binaan di PSKW Andam Dewi umumnya berasal dari latar belakang sosial yang sulit, termasuk menjadi korban berbagai bentuk pelanggaran HAM. Bentuk pelanggaran HAM yang sering terjadi terhadap mereka yaitu, eksploitasi seksual dan perdagangan orang (*Human Trafficking*), Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), perkosaan dan kekerasan seksual, perbudakan dan pekerja anak, diskriminasi gender dan ketidaksetaraan ekonomi, serta pernikahan paksa dan pernikahan anak.

## **B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Oleh Pemerintah untuk Mengatasi Pelanggaran HAM sebagai Penyebab Perempuan dan Anak Menjadi Warga Binaan PSKW Andam Dewi**

Dalam rehabilitasi sosial untuk mengatasi pelanggaran HAM yang menyebabkan anak perempuan menjadi warga binaan di PSKW Andam Dewi Suka Rami Kabupaten Solok, pengelola mungkin menghadapi beberapa kendala yaitu:

1. Stigma Sosial Anak perempuan yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM sering menghadapi stigma yang kuat dari masyarakat.
2. Keterbatasan dana dan sumber daya manusia dapat membatasi kemampuan PSKW untuk menyediakan layanan rehabilitasi yang komprehensif, termasuk konseling psikologis dan pendidikan.
3. Kurangnya Dukungan Keluarga, dalam beberapa kasus, dukungan keluarga yang minim atau tidak ada sama sekali dapat menjadi kendala besar dalam proses rehabilitasi anak perempuan.
4. Koordinasi Lembaga: Rehabilitasi yang efektif memerlukan koordinasi antara berbagai lembaga, termasuk aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan organisasi non-pemerintah.
5. Keterbatasan Program
6. Kurangnya Kesadaran

## **C. Upaya-Upaya Pemerintah untuk Mengatasi Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah terhadap Pelanggaran HAM Sebagai Penyebab Perempuan dan Anak Menjadi Warga Binaan PSKW Andam Dewi**

1. Pemerintah telah menerbitkan berbagai undang-undang dan kebijakan untuk melindungi perempuan dan anak.
2. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran HAM terhadap perempuan dan anak.
3. Pemberian perlindungan dan rehabilitasi sosial.
4. Pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan
5. Pelatihan wirausaha bagi perempuan kurang mampu agar mereka memiliki sumber penghasilan sendiri dan tidak rentan terhadap eksploitasi.
6. Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM.

## **IV. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab anak perempuan menjadi warga binaan dikarenakan mereka menjadi korban kekerasan fisik, emosional dan seksual. Mereka seringkali mencari perlindungan dari situasi yang

tidak aman atau merugikan di rumah atau masyarakat.

2. Kendala yang ditemui diantaranya, trauma berat pada korban, diskriminasi, stigma masyarakat, serta kurangnya kepercayaan pada orang lain.
3. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan konseling dan dukungan psikologis, serta koordinasi dengan lembaga lain.

## B. Saran

Rehabilitasi Holisti mengembangkan program rehabilitasi yang lebih komprehensif yang mencakup dukungan psikososial, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kesehatan. Pendekatan holistik membantu memenuhi berbagai kebutuhan individu dan memfasilitasi pemulihan yang lebih efektif.

Program Pemberdayaan Ekonomi menyediakan program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan kewirausahaan dan akses ke modal usaha kecil, untuk membantu penghuni memperoleh keterampilan dan kesempatan kerja setelah meninggalkan panti sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Miskawi. *Menguak WTS Wanita Tuna Susila antara peran positif terabaikan dan termarginalkan dalam bentuk pembelaannya tahun 1970-2009*. Jurnal Ilmiah PROGRESIF Vol 6 No 18. 2009. Hlm 24-25

### B. SUMBER LAIN

Dwi yulianto, 2023 *Bentuk bentuk pelanggaran ham*

<https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/409/mei-26-2024>Diakses 26 mei 2025 pukul 23.09

Pemerintah dalam mengurangi jumlah prostitusi yang semakin meningkat jumlahnya/ EJournal Ilmu Sosiatri, // 2014 diakses pada 20 Mei 2025 pukul 09.00

## UCAPAN TERIMAKASIH

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.**
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak **Dr. Suamperi S.H., M.H**
3. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta Sekaligus Pembimbing, Bapak **Helmi Chandra SY., S.H., M.H**